

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(L A K I P)**



**UNIT KERJA  
KANTOR KECAMATAN KURAU  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk penjelasan tentang hubungan realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran masing-masing sasaran telah di analisis, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan antara realisasi kinerja hingga tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2023 (tahun akhir RPJMD 2018-2023).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kurau, Januari 2024

Camat Kurau



Zulpuaddin, S.Sos  
NIP. 19700202 199303 1 012

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) pada Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Kecamatan Kurau merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang dibentuk di Kabupaten Tanah laut yang memiliki 11 Desa dengan beragam kehidupan ekonomi masyarakatnya, dengan visinya **"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal Di Kecamatan Kurau"** Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing.
3. Mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kurau, Januari 2024  
Camat Kurau

Zulpuaddin, S.Sos  
NIP. 19700202 199303 1 012

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	3
D. Cascading Kinerja .....	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
F. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	12
G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran .....	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya .....	17
I. Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .....	13
B. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .....	15
C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>33</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	33
1. Sasaran RPJMD .....	38
2. Eselon III .....	39
3. Eselon IV .....	41
B. Akuntabilitas Keuangan .....	64
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 .....	38
2. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 Menurut Sasaran dan Program .....	39
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 .....	41

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	13
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati, hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Perubahan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2023 Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah selama TA 2023 sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis Tahun 2023 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Kantor Kecamatan Kurau berusaha untuk mengedepankan isu strategis dan mencoba mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023. Rencana Strategis dimaksud dijabarkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengacu pada indikator sasaran strategi yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai Langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan Masyarakat yang dinamis, baik tingkat daerah, nasional maupun global. Dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dsusun dan dituangkan dalm Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di Masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam 1 tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan

sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat

### C. Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### 1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

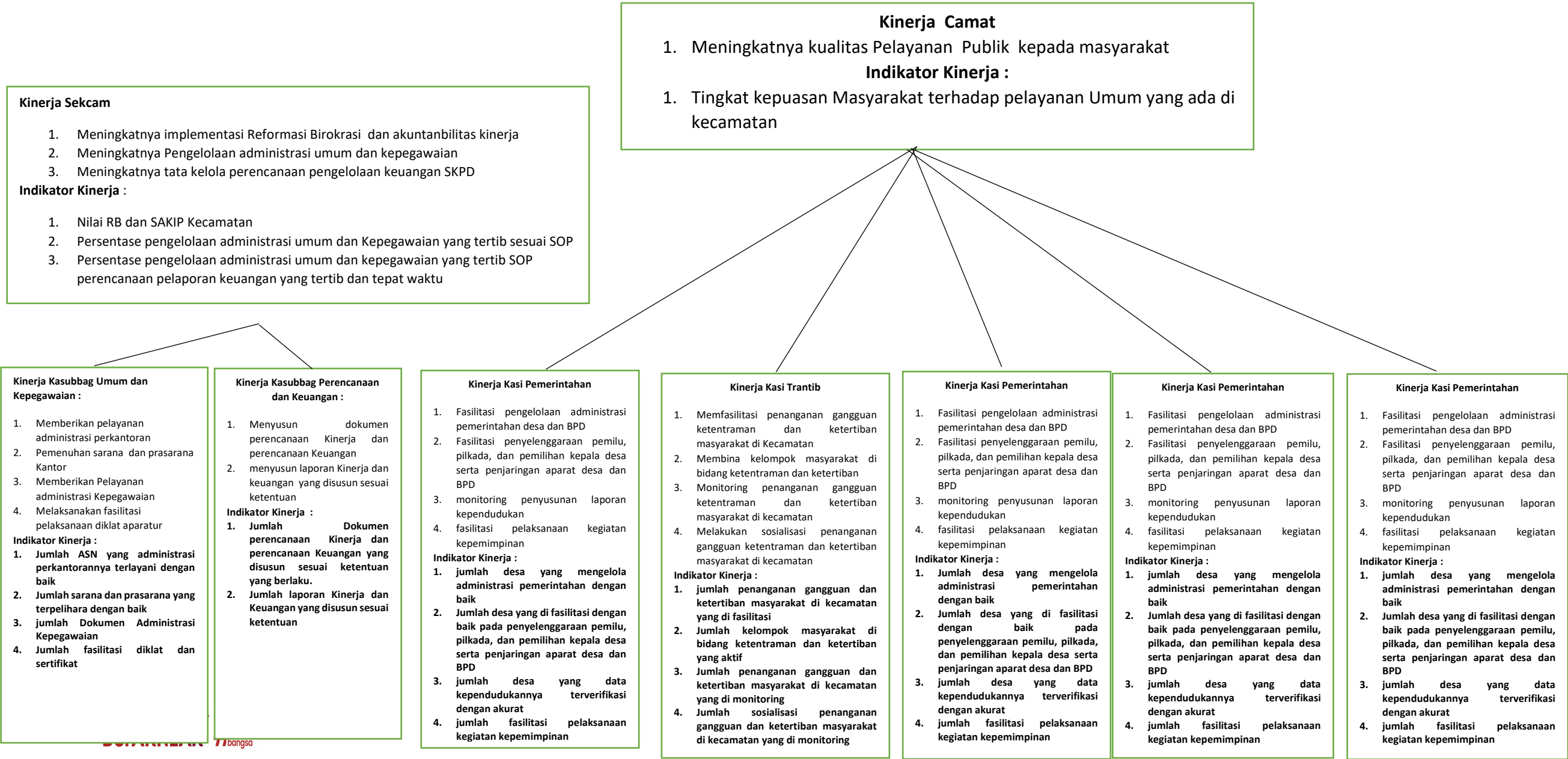
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun Anggaran 2023

#### **D. Cascading Kinerja**

POHON KINERJA SKPD KECAMATAN KURAU



MISI 3
MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
TUJUAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
INDIKATOR TUJUAN
Indek Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Indek keterbukaan informasi publik
PROGRAM
1 Program

LAMPIRAN CASCADING MISI 3 TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD
1	Meningkatkan tata kelola yang baik dan bersih	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kurau

MISI 4
MENINGKATKAN KUANTITAS, KUALITAS DAN RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
TUJUAN
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia
INDIKATOR TUJUAN
Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya wawasan kebangsaan
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Jumlah konflik sosial
PROGRAM
1 Program



## **E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1. Struktur Organisasi**

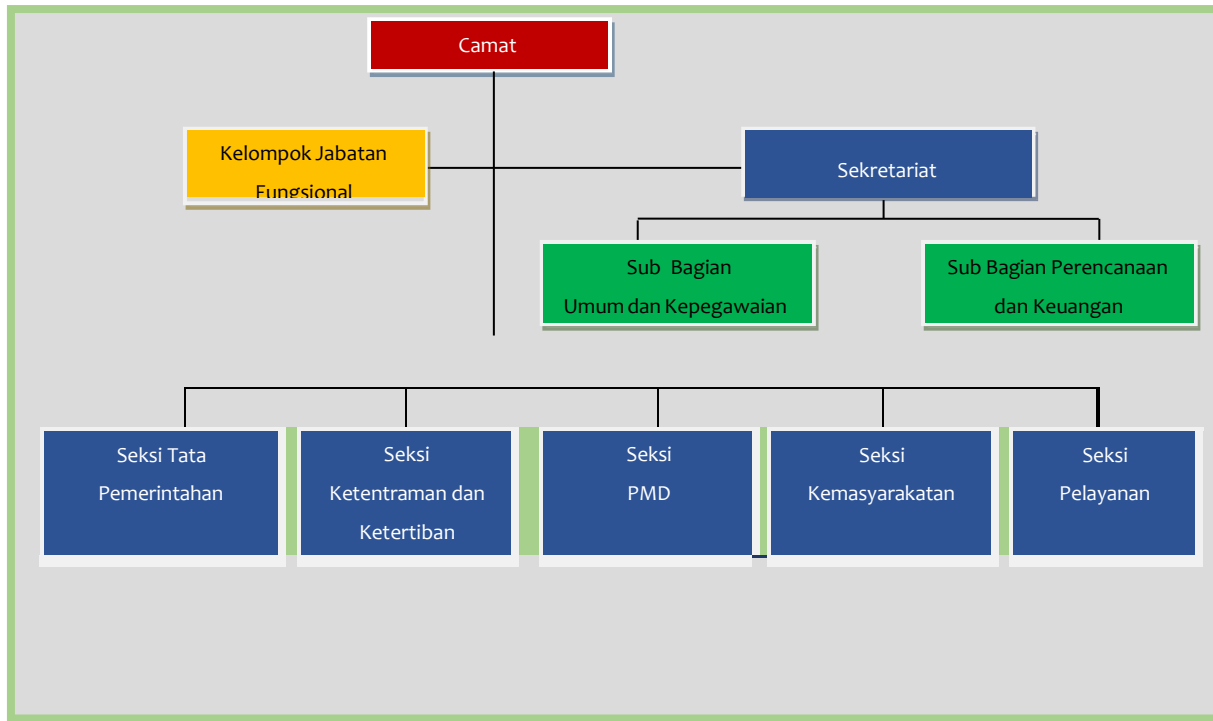
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Untuk pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Kurau mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kurau**



## 2. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kantor Kecamatan Kurau merupakan kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah adalah :

### 1. Camat

Memimpin kecamatan dalam pelaksanaan tugas merumuskan program, mengatur dan memberi petunjuk, mendistribusi tugas, mengarahkan, merumuskan konsep, menyelia, mengevaluasi, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan kegiatan sekretariat, seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan, seksi kemasyarakatan dan seksi pelayanan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaantugas.



2. Sekretaris Camat

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa /

kelurahan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan, menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaantugas.

9. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## F. Isu Strategis

Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Peran Kantor Kecamatan Kurau sebagai penggerak pembangunan sangat strategis, karena bertanggung jawab atas terwujudnya perencanaan pembangunan yang handal sebagai pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah. Adapun isu strategis yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Kurau pada periode tahun 2018-2023 adalah:

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perencana.
6. Masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang menerima Raskin dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
7. Banyaknya usulan masyarakat yang tidak terakomodir pada Musrenbang, sehingga banyak usulan-usulan dari desa yang ditinggal. Selain itu dari usulan-usulan yang sudah masuk ada keterlambatan realisasinya, hal ini menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga ada anggapan Musrenbang yang diadakan setiap tahun sekalihanya menjadi acara rutin saja.
8. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dimana kecamatan sebagai instansi penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menuntut kecamatan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan akuntabel.

#### G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran

Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut mempunyai Pegawai sebanyak 18 Orang, terdiri dari 12 Orang PNS dan 6 Orang Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak. Keadaan pegawai pada Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Keadaan Pegawai Sesuai Eselon dan Golongan

No	Pendidikan (PNS)	Jumlah		Golongan (PNS)	Jumlah		Eselon (PNS)	Jumlah	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	S2	2	-	IV b	-	-	III/a	1	0
2	S1	5	1	IV a	3	0	III/b	1	0

3	D3	-	1	III d	3	1	IV/a	5	0
4	D1	1	-	III c	-	-	IV/b	0	2
5	SMU	1	2	III b	1	1			
6	SLTP	-	-	IIIa	1	-			
				II d	-	1			
				IIb	1	1			
	Jumlah	9	4	Jumlah	9	4	Jumlah	7	2
		13			13			9	

Sumber : Data diolah, Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2023

Keterangan : kolom Eselon jumlah 9 orang pegawai itu hanya untuk pegawai yang memegang jabatan. Terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag Umum dan Kepegawain, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban dan Kasi PMD.

Menurut jenjang pendidikan pegawai Kantor Kecamatan Kurau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**

**Pegawai Kantor Kecamatan Kurau Sesuai Jenjang Pendidikan**

Jumlah Pegawai ( PNS ) menurut Jenjang Pendidikan								
SLTP	SLTA	D1	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
-	3	1	1	-	6	2	-	13
Jumlah Pegawai (PTT/TK) menurut Jenjang Pendidikan								
SLTP	SLTA	D1	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah
-	3	-	1	-	2	-	-	6

Sumber : Data diolah, Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2023

Pegawai Kantor Kecamatan Kurau di tahun 2023 sebanyak 19 orang yang terdiri atas 13 orang PNS dan 6 orang Tenaga Kontrak, dengan daftar pegawai dan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**

**Daftar Pegawai sesuai Jabatan**

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala	Camat Kurau	Zulpuaddin, S.Sos

2.	Sekretariat	Sekretaris	H. Samsudinor, SKM, ME
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mutaba, S.Pd
		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Rahimah
		Pengadministrasian Umum	Rahmadi
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	Iswari Utami Dewi, A.Md
		Bendahara	Darmasiah
3.	Seksi Tata Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Drs. Bahrudin
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Firmansyah, S.STP, MM
		Pengadministrasian Umum	Muhammad Samsudin, AP
5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Faizal Riza, S.Sos
6.	Seksi Kemasyarakatan	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Hj. Sri Rahmiati, SE
7.	Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan	Drs. Paturrahman

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Kurau didukungoleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana**

**Lingkup Kantor Kecamatan Kurau**

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Tanah perkantoran	280 1 M2	280 1 M2	-	-
2	Gedung kantor	1	1	-	-

3	Bangunan rumah dinas camat	1	1	-	-
4	Bangunan tempat paker	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda 2	8	8	-	-
6	Kendaraan Roda 4	2	1	-	1
7	Komputer	5	5	-	-
8	Laptop	5	5	-	-
9	Printer	9	9	-	-
10	Mesin tik	2	2	-	-
11	Kursi Lipat	70	70	-	-
12	Kursi Tamu	1	1	-	-
13	Kursi Putar	2	2	-	-
14	Meja Kerja	14	14	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	White board	2	2	-	-
17	Filling Cabinet	8	8	-	-
18	Tempat tidur	2	2	-	-
19	Papan struktur	8	8	-	-
20	Lemari Es	2	2	-	-
21	Rak besi	2	2	-	-
22	Mesin potong rumput	3	3	-	-
23	TV	4	4	-	-
24	Brangkas	1	1	-	-
24	Wirelles	2	2	-	-
26	Parabola	1	1	-	-
27	CPU	2	2	-	-
28	AC	4	4	-	-
29	Jam dinding	1	1	-	-
30	Kipas Angin	5	5	-	-

31	Dispenser	1	1	-	-
32	LCD Proyektor	1	1	-	-
33	Sound system	1	1	-	-
34	Lemari Arsip	12	12	-	-
35	UPS	6	6	-	-
36	Kursi kerja	5	5	-	-
37	Sofa	2	2	-	-
38	Gorden	1	1	-	-

#### **H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700.1.2.8/143/LHE-AKIP/Insp/2023, tanggal 27 Juni 2023 Perihal Lapiran hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 bahwa ada 4 (empat) komponen yang ditindaklanjuti, yaitu :

<b>Komponen Kinerja</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
Perencanaan Kinerja	Terhadap dokumen perencanaan kinerja yang telah duselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan dievaluasi berkala, sehingga akan dapat dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.	Telah dilakukan penyelarasan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan kinerja
Pengukuran Kinerja	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target kinerja dan dilakukan reuiu berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target kinerja dan dilakukan reuiu berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja
	Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati	Telah dilakukan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

Pelaporan Kinerja	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Telah dilakukan penjaminan keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja
	Agar di dalam pelaporan kinerja menyajikan informasi yang cukup tentang efisiensi sumber daya baik anggaran maupun SDMnya	Telah dilaksanakan pelaporan kinerja menyajikan informasi yang cukup tentang efisiensi sumber daya baik anggaran maupun SDMnya
	Agar didalam pelaporan kinerja diberikan informasi yang cukup terkait Hambatan dan Rencana Aksi yang berkorelasi dengan pencapaian target	Telah dilaksanakan pelaporan kinerja memberikan informasi yang cukup terkait Hambatan dan Rencana Aksi yang berkorelasi dengan pencapaian target
	Agar didalam pelaporan kinerja diberikan informasi yang cukup terkait pencapaian kinerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah dibuat , baik target yang tercapai maupun yang tidak tercapai	Telah dilakukan pelaporan kinerja memberikan informasi yang cukup terkait pencapaian kinerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah dibuat , baik target yang tercapai maupun yang tidak tercapai
	Agar penyajian tabel pendukung pencapaian kinerja disinkronkan dengan penjelasannya	Telah disajikan tabel pendukung pencapaian kinerja disinkronkan dengan penjelasannya
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Terdapat target yang belum tercapai di tahun 2022 agar dievaluasi dan ditindaklanjuti agar kedepannya target tahun 2023 dapat tercapai dengan baik	Membuat rencana aksi secara berkala untuk mengetahui target-target dan kendala-kendala yang dihadapi
	Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja. Hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja	Membuat rencana aksi secara berkala untuk mengetahui target-target dan kendala-kendala yang dihadapi
	Agar saran dari hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang ada datang	Saran dari evaluasi sudah ditindaklanjuti

## I. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022 ini tim penyusun membagi dalam sistematika penyusunan laporan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 1.5**

**Sistematika Penyusunan**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

**Kata Pengantar**

**Ringkasan**

**Eksekutif**

**Daftar Isi**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis perangkat daerah
- G. Dukunagn SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  
KINERJA**

Visi (RPJMD)

Misi (RPJMD)

Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon III (Camat)
3. Eselon III Sekretaris
4. Eselon IV (kasi/Kasubbag)
  - 1) Eselon IV (Kasi)
  - 2) Eselon IV (Kasubag)

**B. Akuntabilitas Keuangan**

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
2. Anggaran dan Realisasi Menurutsasaran dan program
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2022 dan 2023

**BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS,  
AKTUAL, DAN SINERGI  
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Berkarya**

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

### **Inovasi**

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

### **Tertata**

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

### **Relegius**

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

### **Aktual**

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

*Tagline* dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

### **B. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| BERKARYA | : | Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut |
| INOVASI  | : | Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif  |

TERTATA	:	Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan (good governance)
RELIGIUS	:	Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL dan SINERGI	:	Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Kantor Kecamatan Kurau, maka dalam periode kerja tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Kurau yang akuntabel.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan Kantor Kecamatan Kurau, maka dalam periode kerja tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Kurau menetapkan 2 (dua) sasaran meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.
- b. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis, Indikator dan Target**  
**Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90%
2	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60 (CC)
		Nilai SAKIP	79 (BB)
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian	100%
	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2023 Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut merencanakan target kinerja tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018 – 2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2018-2023**

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "***BERINTERAKSI***" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAMAT										
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	75%	80%	85%	87%	90%
SEKRETARIS										
2	Terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks RB	60	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	-	45 (C)	50 (CC)	55 (CC)	60 (CC)
					Nilai SAKIP	65 (BB)	70 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	79 (BB)
3	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian,	100%	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%

		perencanaan, keuangan yang tertib		Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	--	---	---	------	------	------	------	------

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Camat Kurau tahun 2023

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural baik Eselon III dan Eselon IV  
Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>ESELON III (CAMAT)</b>				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90	6 Program / 11 Kegiatan/ 26 Sub Kegiatan	Rp 4,381,661,531
<b>ESELON III (SEKRETARIS CAMAT)</b>				
Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60 (CC)	1 Program / 6 Kegiatan/ 17 Sub Kegiatan	Rp 3,188,145,029
	Nilai SAKIP	79 (BB)		

Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%		
Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%		
ESELON IV (KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)				
Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	3 dokumen	1 Program / 2 Kegiatan/ 4 Sub Kegiatan	Rp 2,393,197,229
Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen		
ESELON IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)				
Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	13 orang	1 Program / 4 Kegiatan/13 Sub Kegiatan	Rp 794,947,800
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana terpelihara dengan baik	367 unit		
Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 dokumen		
ESELON IV (KASI PEMERINTAHAN)				
Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	11 desa	2 Program / 2 Kegiatan/2 Sub Kegiatan	Rp 107,955,160

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat Desa dan BPD	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat Desa dan BPD	3 desa		
Monitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	11 desa		
Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 kegiatan		
ESELON IV (KASI KEMASYARAKATAN)				
Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok	1 Program / 1 Kegiatan/1 Sub Kegiatan	Rp 87,736,263
Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan, dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga sesuai SOP	1 kelompok		
Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	2500 orang		
ESELON IV (KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)				
Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	1 kelompok	2 Program / 2 Kegiatan/3 Sub Kegiatan	Rp 72,458,360
Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi Kecamatan serta profil Desa yang akurat	Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil Desa dengan baik	11 dokumen		

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang mengelola keuangan dengan baik	11 desa		
Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	1 dokumen		
Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan		
ESELON IV (KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)				
Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan/1 SubKegiatan	Rp 938,654,081
Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	11 kelompok		
Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	1 kejadian		
Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah sosialisasi penangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	1 kegiatan		
ESELON IV (KASI PELAYANAN)				
Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	7 Jenis Pelayanan	1 Program / 1 Kegiatan/1 SubKegiatan	Rp 7,429,251
Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat yang dfasilitasi	1 pengaduan		

Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 dokumen		
--	--	--------------	--	--

#### **E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Kurau belum ada.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

##### 1. Sasaran RPJMD

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 -2023, sesuai tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian :

**Misi 1** : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan Masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya.

**Misi 3** : Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

**Misi 5** : Membangun sinergitas yang baik antar Tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan dan sasaran jangka menengah (2018 – 2023) yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kantor Kecamatan Kurau**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	IKM	Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	87%	90%
Terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks RB	60	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Rb	-	45 (C)	50 (CC)	55 (CC)	60 (CC)
				Nilai SAKIP	65 (BB)	70 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	79 (BB)



**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan, keuangan yang tertib	101%	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya tata kelola perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Eselon III (Camat)

### 2.1. Target dan Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi pemerintah. Kantor Kecamatan Kurau mempunyai IKU sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Indikator Kinerja utama**

**Kantor Kecamatan Kurau**

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	IKM	Hasil Survei	Sekretariat

Dari table 3.2 di atas diketahui bahwa IKU Kantor Kecamatan Kurau adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang di ukur melalui hasil survei.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kurau tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi	
				2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90	88,16	86,34

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dan dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Kurau. Perbandingan antara Target Renstra (Rencana Strategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**  
**Kecamatan Kurau Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90	86,34	95,93%

Analisis realisasi capaian nilai IKM melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 di Kecamatan Kurau karena :

- Memberikan informasi dan alternatif solusi yang jelas kepada masyarakat jika memang ada kendala yang menghambat proses pelayanan
- Memaksimalkan sosialisasi, baik melalui pembinaan SDM di Kecamatan Kurau, perangkat desa maupun melalui media sosial tentang Standar Operasional Pelayanan baik, sehingga bisa meningkatkan tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap prosedur pelayanan masyarakat. Hal ini bisa mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan publik yang diberikan Kecamatan Kurau.

**Tabel 3.5**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	7.429.251	6.216.000

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

		yang ada dikecamatan			
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	36.460.000	16.808.000
3	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	4.899.650	2.850.000
4	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal ilka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.748.330	94.265.000
			Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	938.654.081	818.422.800
			Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.120.000	43.707.050
5	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	26.009.760	24.140.000
			fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.206.830	8.200.000

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

		pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10.988.600	10.950.000
Rata-Rata Capaian Kinerja				1.193.516.502	1.025.558.850

**Tabel 3.6**  
**Tabel Efisiensi**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	85,93%	14,07%

## 2. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Kurau Tahun 2023 untuk persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terealisasi penuh 100%.

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI	
				2022	2023
1	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	-	-
		Nilai SAKIP Kecamatan	79	72,50	62
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
3	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dan dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dilakukan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Kurau. Perbandingan antara Target Renstra (Rencana Strategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi kinerja s.d Akhir Periode**  
**Renstra Kecamatan Kurau Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	-	-
		Nilai SAKIP	79	62	96.20%
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%	100%	100%
3	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Analisis realisasi capaian nilai IKM melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 di Kecamatan Kurau karena Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan TUPOKSI pegawai dengan cara menjalin koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan, membangun komunikasi

yang transparan sehingga siapapun pada kondisi apapun dapat melakukan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Nilai Sakip kecamatan Kurau Tahun 2023**  
**Berdasarkan Komponen Penilaian**

NO	Komponen Nilai	Nilai	Keterangan
1	Perencanaan kinerja	22,50	
2	Pengukuran Kinerja	17,70	
3	Pelaporan kinerja	7,05	
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	14,75	
Jumlah		62	

**Tabel 3.10**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.400.000	1.000.000
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	625.000	475.000
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.390.172.229	2.001.660.844
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1.000.000	275.000
		Administrasi umum perangkat daerah	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.207.993	1.918.500

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.558.716	49.392.275
			Penyediaan peralatan rumah tangga	4.619.978	1.640.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.111.347	2.520.000
			Penyediaan bahan/material	9.988.831	9.981.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179.900.000	152.311.350
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan mebel	42.919.217	40.560.500
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	165.708.365	141.475.000
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.662.169	48.484.744
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	146.741.184	144.777.460
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29.000.000	15.095.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.500.000	50.527.425
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.000.000	4.460.000
		Rata-Rata Capaian Kinerja		804.917.800	663.143.254



**Tabel 3.11**  
**Tabel Efisiensi**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	83,37%	16,63%

**Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
kepadamasyarakat**

Pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan telah menetapkan indikator kinerja tersebut, walaupun untuk indikator kinerja *outcomenya* belum maksimal dapat diukur tingkat capaiannya. Kantor Kecamatan Kurau memiliki 7 jenis kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi

**Tabel 312**  
**Realisasi Jenis Layanan Kecamatan Kurau Tahun 2023**

No.	Jenis Layanan	Capaian
1.	Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	100 Lembar
2.	Pelayanan pembuatan Surat Ijin Keramaian	0 Lembar
3.	Pelayanan pembuatan Domisili	0 Lembar
4.	Rekomendasi	19 Lembar
5.	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Izin Menikah	38 Lembar
6.	Surat Pengantar Pembuatan SKCK	1 Lembar
7.	Surat Keterangan Ahli waris	11 Lembar
8.	Surat Kematian	3 Lembar

Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap target dan realisasi pada Tahun 2023 di Kecamatan Kurau antara lain :

**Tabel 3.13**

**Pencapaian Sasaran Strategis I Kecamatan Kurau Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90	86,34	95,93	Tercapai

Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan dengan target 90, realisasi 86,34 capaian indikator sasaran sebesar 95,93.

Adapun yang mendukung tercapainya target indikator kinerja adalah seluruh program yang tercantum pada DPA Kecamatan Kurau Tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.381.661.131,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.692.112.948,-. Capaian Indikator Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari 88,16% menjadi 84,26%. Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung dalam pencapaian indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan sebanyak 5 (lima) kasi dan 2 (dua) Kasubbag.

Hasil survey kepuasan masyarakat diukur berdasarkan survey terhadap pengguna layanan yang ada di Kecamatan Kurau antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelayanan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator sasaran adalah unsur pelayanan yang masih rendah yakni unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, terutama untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan pembuatan E-KTP tidak bisa langsung dilayani karena kurangnya pemeliharaan dan kualitas layanan jaringan internet yang kurang bagus, sehingga menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat selaku pemohon kurang mendapatkan pelayanan dengan maksimal.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini mengadakan pemeliharaan dan penambahan kecepatan kualitas jaringan internet.

Berikut tabel yang menjelaskan Sasaran Strategis Pelayanan yang telah di capai oleh semua Seksi di Kecamatan Kurau berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang di buat sebagai berikut :

## **1. Kasi Pemerintahan**

- a. Perbandingan realisasi dengan target

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**  
**Bidang Pemerintahan**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	11 desa	11 desa	100%	11 desa
2	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat Desa dan BPD	3 desa	3 desa	100%	3 desa
3	Monitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	11 desa	11 desa	100%	11 desa
4	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksana kegiatan kepemimpinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 orang
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di pelayanan Publik bidang pemerintahan dari semua target, capaian dan realisasi antara tahun 2022 dan 2023 Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik pada tahun 2022 sebanyak 11 desa dan pada tahun 2023 juga ada 11 desa atau 100%, sedangkan Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta pada tahun 2022 telah terlaksana 11 desa dan tahun 2023 3 desa, untuk jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat pada tahun 2022 ada

11 desa yang melaporkan data kependudukannya dengan tertib dan pada tahun 2023 juga ada 11 desa atau 100% yang melaporkan data kependudukannya secara tertib dan akurat dan untuk pelaksanaan Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan tahun 2022 jumlah peserta Paskibraka tetap sebanyak 3 orang atau 100% dan 2023 hanya 1 kegiatan dan mengalami penambahan menjadi jumlah peserta Paskibraka sebanyak 25 orang terdiri atas siswa SMK dan SMU.

c. Analisis Kegiatan

Kegiatan Kasi Pemerintahan selama Tahun 2023 yaitu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan sebagai kesatuan politik, sosial budaya ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Pemerintahan hanya 1 orang

e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

**Tabel 3.15**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Pemerintahan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
----	---------	----------	--------------	----------	-----------

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal ilka serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.748.330	94.265.000
2	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.206.830	8.200.000
Rata-Rata Capaian Kinerja				107.955.160	102.465.000



Keterangan : Paskibraka Tahun 2023





Keterangan : Deklarasi Damai Pilkades Tahun 2023





Keterangan : Penyaluran surat suara Pilkades

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Kendala yang dihadapi untuk pendukung kinerja Kecamatan Kurau adalah dukungan antar pegawai dan koordinasi dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan pemerintah kab/kota dan SKPD terkait. Selain itu, fasilitas diberikan Kecamatan Kurau untuk menunjang kinerja pegawai.

**Tabel 3.16**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Pemerintahan**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	94,91%	5,09%

## 2. Kasi Kemasyarakatan

### a. Perbandingan realisasi dengan target

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**  
**Bidang Kemasyarakatan**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok	1 kelompok	100%	1 kelompok
2	Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga sesuai SOP	1 kelompok	1 kelompok	100%	1 kelompok
3	Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	2200 orang	2200 orang	100%	2500 orang
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

### b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang kemasyarakatan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dari target 1 kelompok telah terealisasi 1 kelompok yaitu Majelis Sullamul Anwar Desa Kurau atau

100% dan jumlah ini berbeda pada tahun 2022 yaitu 8 kelompok, kemudian dari Fasilitas kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 1 kegiatan telah terealisasi 3 kegiatan yaitu Safari Ramadhan dan pelaksanaan MTQ atau 100% dan pada tahun 2023 jumlah kegiatannya juga sama yaitu 3 kegiatan selain itu Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan pada tahun 2023 telah terealisasi 2035 orang penerima bantuan sosial namun pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan jumlah penerima bantuan sosial menjadi 2123 orang hal ini dikarenakan ada penyempurnaan dan verifikasi ulang data dari BPS terhadap penerima bantuan sosial tersebut sehingga jumlah penerima menjadi 2123 orang dikarenakan penerima bantuan sosial yang meninggal dunia, pindah domisili dan sudah mampu dan telah direalisasikan sebanyak 2123 orang atau 100%.

c. Analisis Kegiatan

Pemberian Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Kurau dari Rp. 766.325.000,- melalui ajuan proposal dari organisasi masyarakat yang ada di desa, dari ajuan proposal terjaring sebanyak 6 (enam) proposal organisasi kemasyarakatan dan sudah melaksanakan sesuai NPHD dengan serapan Rp. 818.422.800,- (87,19%).

Melaksanakan Safari Ramadhan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh SKPD beserta jajarannya di Desa Kurau Kecamatan Kurau bertempat di Masjid Nurul Azhar.

Pelaksanaan MTQN ke XLV Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kecamatan Kintap dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 juli 2023. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Kintap untuk Kecamatan Kurau mendapat peringkat ke 5 dan Juara 2 Pawai Ta'aruf.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Kemasyarakatan hanya 1 orang ASN.

e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

**Tabel 3.18**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Kemasyarakatan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	938.654.081	818.422.800
Rata-Rata Capaian Kinerja				938.654.081	818.422.800

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap Program Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat di wilayah Kecamatan juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.19**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Kemasyarakatan**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	87,19%	12,81%



Keterangan : Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Tahun Anggaran 2023





Keterangan : Kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2023





Keterangan : Kafilah Kecamatan Kurau MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Tanah Laut

## 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.. Perbandingan realisasi dengan target

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**  
**Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	1 kelompok	1 kelompok	100%	12 kelompok
2	memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi Kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	11 dokumen	11 dokumen	100%	1 desa
3	Fasilitasi keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	11 desa	11 desa	100%	11 desa
5	Fasilitasi kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrembang tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

a. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2022 telah terfasilitasi sebanyak 11 Kelompok dan pada tahun 2023 telah terfasilitasi sebanyak 11 kelompok, terkait pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat pada tahun 2022 sudah



dilaksanakan sebanyak 11 desa dan pada tahun 2023 ada 11 desa dari target 11 desa atau 100% hal ini disebabkan setiap desa belum semua mampu menyusun profil desa dengan baik dikarenakan sumber daya desa yang masih belum maksimal untuk menyusun profil desa yang baik dan pada tahun 2022 hanya 11 desa, untuk Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2023 telah difasilitasi 11 desa dan tahun 2023 telah difasilitasi 11 desa atau 100%, dalam hal pemberian pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil pada tahun 2022 tidak ada lagi melewati Kecamatan dan pada tahun 2023 tidak adanya layanan izin mendirikan bangunan 0% hal ini disebabkan karena terbentur dengan aturan, untuk pelaksanaan Fasilitasi

Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan pada tahun 2022 telah difasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 kali dan pada tahun 2023 juga telah difasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 kali atau 100% yang disertai tahapan pelaksanaan melalui MusrenbangDes.

b. Analisis Kegiatan

Penilaian keberhasilan Camat merupakan upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada evaluasi perkembangan kecamatan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan merupakan Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Pemerintahan hanya 1 orang ASN dan 1 orang PTT.

d. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

**Tabel 3.21**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	36.460.000	16.808.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	26.009.760	24.140.000
3			Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10.988.600	10.950.000
Rata-Rata Capaian Kinerja				73.458.360	51.898.000

e. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Pelaku usaha skala mikro dan kecil merupakan salah satu penopang perekonomian warga dan juga Kecamatan Kurau, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan fasilitasi agar memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.

**Tabel 3.22**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Pemerintahan Masyarakat dan Desa**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	70,65%	29,35%



Keterangan : Evaluasi RAPBDes

6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.23  
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023  
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Memfasilitasi penanganan gangguan kentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan kentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
2	Membina kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	11 kelompok	11 kelompok	100%	11 kelompok
3	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	1 kejadian	1 kejadian	100%	1 kejadian
4	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang dimonitoring	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi untuk tahun 2022 telah terfasilitasi sebanyak 1 kegiatan sedangkan tahun 2023 terfasilitasi sebanyak 1 kegiatan atau 100%, untuk jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif pada tahun 2021 berjumlah 11 desa dan tahun 2023 berjumlah 11 desa atau 100%, adapun jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring di tahun 2022 dilaksanakan monitoring sebanyak 11 desa dan pada tahun 2023 sebanyak 11 desa atau 100%, Jumlah sosialisasi penanganan gangguan danketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring pada tahun 2022 adalah 11 kali dan tahun 2023 adalah 11 kali atau 100%.

c. Analisis Kegiatan

Kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban selama Tahun 2023 melaksanakan sosialisasi narkoba terhadap anak-anak sekolah dan melakukan pemantauan, pengawasan analisis dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Ketentraman dan Ketertiban 2 orang ASN.

e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja

**Tabel 3.24**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	4.899.650	2.850.000
2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.120.000	43.707.050
Rata-Rata Capaian Kinerja				66.019.650	46.557.050

f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kurau diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.

**Tabel 3.25**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	70,51%	29,49%





Keterangan : Kegiatan Forkopimcam

7. Kasi Pelayanan

- a. Perbandingan realisasi dengan target

Tabel 3.26  
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023  
Bidang Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan masyarakat pelayanan terpadu Kecamatan sesuai SOP	7 jenis pelayanan	7 jenis pelayanan	100%	7 layanan
2	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah aduan masyarakat yang di fasilitasi	1 pengaduan	1 pengaduan	100%	1 aduan
3	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

- b. Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 1 di Pelayanan publik bidang Pelayanan pada Jumlah

Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP pada tahun 2022 berjumlah 7 layanan dan tahun 2023 berjumlah 7 layanan atau 100% dari, kemudian untuk Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi dalam tahun 2022 sebanyak 1 aduan dan pada tahun 2023 sebanyak 1 aduan dari target 1 aduan atau 100% terdiri atas aduan Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang terdata ada 1 dokumen tahun 2022 dan pada tahun 2023 ada 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.

c. Analisis Kegiatan

Analisis kegiatan terhadap kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 86,34% masuk kepada kategori “Sangat Berhasil”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

- 1. Adanya komitmen bersama.
- 2. Dukungan perencanaan bagus.
- 3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
- 4. Dukungan sarana dan praarana yang memadai.
- 5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah ASN di bidang Kasi Ketentraman dan Ketertiban hanya 1 orang ASN dan 1 orang PTT.

- e. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan penunjang kinerja
- f. Analisis Kendala dan Rencana Aksi

Tabel 3.27  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023  
Bidang Pelayanan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	7.429.251	6.216.000
Rata-Rata Capaian Kinerja				7.429.251	6.216.000

Kecamatan Kurau harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat-surat kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat;

Tabel 3.28  
Tabel Efisiensi  
Bidang Pelayanan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	83,67%	16,33%





Keterangan : Kegiatan Pelayanan

**Sasaran II : Meningkatnya pengelolaan administrasi  
perkantorandan kepegawaian,  
perencanaan dan pelaporan.**

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian dan Perencanaan, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- a) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, dan hal terkait tugas dan fungsi.
- b) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pembayaran TPP berbasis *e-kita* secara online.
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian dandalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan absensi finger print baik absen masuk dan pulang kantor.
- d) Kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu: Revisi terhadap Indikator Sasaran Renstra 2018-2023, Renja 2022, RKT, RKA, DPA 2021, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan LAKIP, dan LKPJ tahun 2022.
- e) Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi KUR, RKBU, dll.
- f) Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor meliputi pemeliharaan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sedangkan untuk pemeliharaan peralatan meliputi AC, kursi, printer, dll

Adapun uraian yang berhubungan dengan sasaran strategis II sebagai berikut:

**Tabel 3.29**

**Pencapaian Sasaran**

**Strategis II**

**Kecamatan Kurau Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi		Tingkat Capaian
				2022	2023	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	90	72,50	62	68,8%
	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100 %	.100%

Sasaran pada rencana strategis II yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dari 2 (dua) indikator kinerjanya target untuk Nilai Sakip Kecamatan pada tahun 2023 adalah 90, sedangkan untuk Persentase pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian yang tertib tahun 2023 dari target 100% telah tercapai 100%.

**Tabel 3.30**

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**

**Bidang Perencanaan dan Keuangan**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

2	Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

**Tabel 3.31**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Perencanaan dan Keuangan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.400.000	1.000.000
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	625.000	475.000
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.390.172.229	2.001.660.844
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1.000.000	275.000
Rata-Rata Capaian Kinerja				2.393.197.229	2.003.410.844

**Tabel 3.32**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Perencanaan dan Keuangan**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	83,71%	16,29%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 2 di bidang Perencanaan dan Keuangan pada Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2022 ada 8 dokumen yang disusun dan tahun 2023 dari target 8 dokumen telah tersusun 8 dokumen, adapun dokumen yang disusun adalah Renstra 2018- 2023, Renja 2024, RKT, RKA, DPA 2023, DPA Perubahan 2023, Laporan AKIP 2023 dan LKPJ tahun 2023, kemudian untuk Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan dalam tahun 2022 sebanyak 3 dokumen dan pada tahun 2023 sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100% yaitu CALK, laporan bulanan dan Laporan triwulanan. Dari semua dokumen yang ada pada bagian perencanaan dan keuangan, nantinya akan direviu untuk penentuan nilai kinerja Kecamatan Kurau sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja secara keseluruhan.

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dan 2023**  
**Bidang Umum dan Kepegawaian**

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	13 orang	13 orang	100%	13 orang
2	Pemenuhan sarana dan prasarana	jumlah sarana dan prasaran yang dipelihara dengan baik	367 unit	367 unit	100%	367 unit
3	Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

**Tabel 3.34**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023**  
**Bidang Umum dan Kepegawaian**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi umum perangkat daerah	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.207.993	1.918.500
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.558.716	49.392.275
			Penyediaan peralatan rumah tangga	4.619.978	1.640.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.111.347	2.520.000
			Penyediaan bahan/material	9.988.831	9.981.000
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179.900.000	152.311.350
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan mebel	42.919.217	40.560.500
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	165.708.365	141.475.000

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR KECAMATAN KURAU TAHUN 2023**

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.662.169	48.484.744
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	146.741.184	144.777.460
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29.000.000	15.095.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.500.000	50.527.425
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.000.000	4.460.000
	Rata-Rata Capaian Kinerja		804.917.800	663.143.254

**Tabel 3.35**  
**Tabel Efisiensi**  
**Bidang Umum dan Kepegawaian**

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	82,39%	17,61%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian strategis pada sasaran 2 di bidang Umum dan Kepegawaian pada Jumlah Dokumen Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik pada tahun 2022 berjumlah 22 orang dan semua sudah terlayani dengan baik atau 100%, sedangkan tahun 2023 hanya 13 orang hal ini di sebabkan adanya ASN yang pensiun, untuk jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada tahun 2022 telah dipelihara sebanyak 13 buah dan pada tahun 2023 jumlah yang telah dipelihara sebanyak 13 buah dan semuanya telah dipelihara 100%, adapun di tahun 2023 jenis sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan roda 2 dan 4, untuk jumlah dokumen administrasi kepegawaian baik tahun 2022 maupun 2023 berjumlah 20 dokumen dan telah dilaksanakan sebanyak 20 dokumen juga, pada jumlah fasilitasi diklat dan sertifikat pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada fasilitasi tersebut.

## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Realisasi keuangan APBD Kecamatan Kurau berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### a. Belanja

Realisasi belanja Kecamatan Kurau pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisaisi Belanja Kecamatan Kurau tahun 2023

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	4.181757.204	3.534.699.148	84,53
1	Belanja Pegawai	2.390.172.229	2.001.660.844	83,75
2	Belanja Barang dan Jasa	1.025.259.975	860.163.304	83,90
3	Belanja Hibah	766.325.000	672.875.000	87,81
II	Belanja Modal	199.904.327	58,700,000	78,74
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.604.327	140.342.000	82,60
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	17.071.800	56,91
Jumlah		4.381.661.531	3.692.112.948	84,26

### 2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Rincian realisasi Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program untuk Kecamatan Kurau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Alokasi dan Realisasi**  
**Keuangan**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.400.000	1.000.000	71,42
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	625.000	475.000	76
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.390.172.229	2.001.660.844	83,74
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1.000.000	275.000	27,5
		Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.207.993	1.918.500	59,80
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.558.716	49.392.275	80,23
			Penyediaan peralatan rumah tangga	4.619.978	1.640.000	35,49
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.111.347	2.520.000	41,23
			Penyediaan bahan / material	9.988.831	9.981.000	99,92



			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179.900.000	152.311.350	84,66
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan mebel	42,919,217	40,560,500	91.53
			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	165,708,365	141,475,000	85,37
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81,662,169	48,484,744	45.23
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	146,741,184	144,777,460	98,66
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29,000,000	15,095,000	52,05
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64,500,000	50,527,425	92,71
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9,000,000	4,460,000	49,55

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7,429,251	6,216,000	83,66
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36,460,000	16,808,000	46,09
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,899,650	2,850,000	58,16
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD negara RI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	00,748,330	94,265,000	94,50

			Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragam, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	938,654,081	818,422,800	87,19
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61,120,000	43,707,050	71,51
3	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26,009,760	24,140,000	82,81
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8,206,830	8,200,000	99,91
			Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10,988,600	10,950,000	99,64

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 ada 6 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan sedangkan di Tahun 2022 ada 3 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran Tahun 2022 untuk seluruh belanja sebesar Rp. 3.429.575.371,-. Dibandingkan Tahun 2023 jumlah anggaran belanja naik yaitu sebesar Rp. 4.381.661.531,- dari anggaran perubahan. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah program dan kegiatan dan pagu Tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

No	2022		2023	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi umum perangkat daerah		Administrasi umum perangkat daerah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
3			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
4			Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah

6	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan oengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan oengawasan pemerintahan desa
	Total Anggaran Rp 3.429.575.371,00		Total Anggaran Rp 4.381.661.531,00	

Adapun realisasi belanja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.128.171.477,- , dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.157.019.492,-. Sedangkan untuk belanja pegawai pada belanja operasi anggaran Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.648.671.361,- dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.931.940.575,-. Belanja modal meningkat di Tahun 2023 sebesar Rp. 58.700.000,-.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat dijadikan masukan penting bagi Kantor Kecamatan Kurau dalam merumuskan strategi dan kebijakan organisasi seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan adanya tantangan internal maupun eksternal lainnya. Selain tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan kinerja baik yang telah berhasil dicapai, dapat dipertimbangkan pula perluasan dan penajaman indikator sasaran. Angka target yang ditetapkan dapat pula ditinjau ulang untuk ditingkatkan dalam rangka percepatan perwujudan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2018-2023 dikategorikan BAIK. Kategori Baik Tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Kurau tahun 2023 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 100%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya *Performance Management System/PMS*) di lingkungan Kantor Kecamatan Kurau. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah, walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki,

Kantor Kecamatan Kurau mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Pada program kegiatan yang belum optimal dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kurau pada tahun 2023 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang. Sedangkan hambatan maupun kendala tersebut dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan oleh semua pihak dilingkup Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan didalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam

dokumen LAKIP;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

## 2. Strategi Peningkatan Kinerja

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan dalam pelayanan masyarakat. Mudah mudahan LAKIP Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ini menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan harapan masyarakat Kecamatan Kurau pada umumnya.

Kurau,     Maret 2024

Camat Kurau



Zulpuaddin, S.Sos  
Pembina / IVa  
NIP. 19700202 199303 1 012